

Filsafat Sebagai Ruang Introspeksi dalam Menyikapi Isu Politisasi Agama

Rais Dzulfikri¹, Kurnia Alfi Rianti², A. Fauzan Hidayatullah³

^{1,2,3}UIN Walisongo Semarang

rais.dzulfikri_1808086029@student.walisongo.ac.id

Diterima: 14-05-2020, Disetujui: 10-06-2020, Dipublikasikan: 22-07-2020

Abstract: *This article aims as an introspection that in addressing the issue of politicization of religion when viewed from a philosophical point of view, which in this synthesis is a conception in which to gather all the knowledge obtained to compile a view. The problem is focused on the issue of religious politicization that has been rife lately where the contestation of prospective rulers in various parts of Indonesia uses religion in politics that aims to dominate power by bringing religious values so that it raises holistic values among the people and reap as many voices as possible. in the general election. The politicization of religion is a neo-khawarij movement if it incorporates elements of theology in its doctrine. To approach this problem, theoretical references in the form of several books in the form of authentic hadith, philosophy, and politics, as well as related journal articles in the form of politicization of religion and its relation to natural resources are analyzed qualitatively. The study in this article concludes that the issue of religious politicization is feared to be a diversion of issues in the mass media by the capitalists to cover up the exploitation of their natural resources.*

Keywords: *Synthesis, Philosophy, The Politicization of Religion.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan sebagai introspeksi bahwasanya dalam menyikapi isu politisasi agama jika ditinjau dari segi filsafat yaitu dimana pada sintesa ini merupakan konsepsi dimana mengumpulkan semua pengetahuan yang diperoleh untuk menyusun suatu pandangan. Masalah difokuskan pada isu politisasi agama yang marak terjadi pada akhir-akhir ini dimana kontestasi calon penguasa di berbagai daerah di belahan Indonesia menggunakan agama dalam berpolitik yang bertujuan untuk mendominasi kekuasaan dengan membawa nilai agama sehingga memunculkan nilai holistik di kalangan masyarakat dan meraup suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan umum. Politisasi agama merupakan gerakan neo-khawarij jika memasukkan unsur teologi dalam doktrinnya. Guna mendekati masalah ini digunakan acuan teori berupa beberapa buku berupa buku hadits shahih, filsafat, dan politik serta artikel jurnal terkait yang berupa politisasi agama dan kaitannya dengan sumber daya alam dan dianalisis secara kualitatif. Kajian pada artikel ini menyimpulkan bahwa dengan adanya isu politisasi agama dikhawatirkan menjadi sebuah pengalihan isu di media massa oleh pihak kapitalis agar dapat menutupi eksploitasi sumber daya alam yang mereka lakukan.

Kata Kunci: Sintesa, Filsafat, Politisasi Agama.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokatis, negara yang menggunakan sistem pemilihan pemimpin suatu daerah (pemilu) dengan sistem demokrasi, yaitu melalui pemungutan suara. Partai adalah organisasi masyarakat yang terlegalisir oleh badan penyelenggara pemilu (KPU) sehingga dapat mengajukan pasangan calon agar dapat berkontestasi dalam pemilu. Empat tahun sekali, diadakan pemilihan presiden sehingga dikenal sebagai pesta demokrasi. Politik adalah sistem tatanan masyarakat yang berkuasa menentukan kebijakan

suatu wilayah dan kehidupan bermasyarakat. Politik memiliki trend doktrin tiap tahunnya, mulai dari trend politik ekonomi, pembangunan hingga agama.

Agama merupakan satu dari sekian banyak doktrin politik karena memiliki tujuan mendapatkan suara rakyat sebanyak-banyaknya, karena jika melihat situasi saat ini berpolitik dengan nilai holistik agama lebih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia¹. Tentunya hal tersebut menjadikan para petinggi dikalangan pemerintah berusaha merebut kursi kekuasaan dengan menggunakan strategi politik. Munculnya istilah agama dalam politik karena nilai-nilai agama memiliki daya tarik holistik dimata masyarakat, sehingga digunakan sebagai strategi politik praktis. Nilai holistik agama didoktrinkan dalam kontestasi politik mulai dari penggunaan istilah politik, visi misi, bahkan menjadikan tokoh agama terpendang sebagai figur berkarisma dan dijadikan calon pemimpin².

Adanya situasi tersebut menyebabkan hampir sebagian masyarakat Indonesia mempercayai bahwa agama berpengaruh terhadap sikap dalam berpolitik. Sikap berpolitik yang dilebur dengan agama inilah yang dapat juga disebut dengan politisasi agama. Politisasi agama adalah penggunaan istilah dalam islam dan nilai syariat yang kemudian dihubungkan dengan istilah politik dan berpengaruh pada makna atau nilai-nilai dalam kehidupan dan kerangka realitas manusia, sehingga menimbulkan realisasi sosio-individu bahwa politik dapat menimbulkan ketenangan rohani individu masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Dalam buku Pengantar Filsafat, filsafat spekulatif dan dialektika Hegel merupakan hasil pemikiran George Wilhelm Fredrich Hegel yang membahas bagaimana cara berfikir untuk mengumpulkan segala bentuk informasi yang dapat diperoleh guna menyusun pandangan sebuah fenomena kehidupan dan mencari kesatuan dalam keberagaman³.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan fokus kajian pustaka tentang Filsafat Sebagai Ruang Introspeksi Dalam Menyikapi Isu Politisasi Agama atau yang terkait dengan topik tersebut. Metode pengumpulan data ini mengambil kutipan dari berbagai sumber dari beberapa kajian pustaka seperti buku ini berupa buku hadits dan buku mengenai politik ketatanegaraan Islam yang membahas tentang kaitan antara agama dengan politik.

Selain itu terdapat buku filsafat yang menjadi acuan kami untuk menulis artikel ini, yang didalam buku tersebut terdapat filsafat spekulatif. Serta buku mengenai analisis Karl Marx jika politik tersebut ditinjau dari segi kaum kapitalis dan artikel jurnal yang terkait dalam konteks artikel ini yaitu politik, agama, dan ekonomi yang terkait. dan menganalisis dari setiap kutipan tersebut kemudian dijadikan satu kalimat yang berkesinambungan dan diparafrasa menjadi kalimat yang berbeda dari buku maupun artikel sumber.

Hasil dan Pembahasan

Sintesa filsafat spekulatif yang terdapat dalam buku Pengantar Filsafat karya Louis Katsoff (1989) ditulis bahwa, filsafat spekulatif pada masa modern tersusun dalam sistem

¹ Muhammad Ramadhan, 'Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa' (Nasya Expanding Management, 2019).

² Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin & Peradaban* (Gramedia pustaka utama, 2019).

³ Rachmat Kriyantono, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat Dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam* (Prenada Media, 2019).

yang dibuat oleh filsuf asal Jerman George Wilhelm Fredrich Hegel. Hegel berpendapat bahwa filsafat spekulatif adalah bentuk usaha untuk menghimpun semua kenyataan kedalam sebuah sistem yang merangkum segalanya, sehingga diharapkan meliputi segenap pengetahuan manusia. Hegel berusaha menyimpulkan gagasan tentang metafisika, alam fisik, manusia, masyarakat, dan gagasan mengenai agama serta filsafat. Filsafat spekulatif Hegel cenderung bersifat kemasyarakatan karena pada tahun 1800-an di Jerman sistem politik dan perang sedang berkecamuk sehingga berpengaruh kepada beberapa pemikiran Hegel. Pada tahun 1831 bulan November tanggal 14 Hegel meninggal karena penyakit kolera yang dideritanya tepat pada usia 61 tahun, sehingga sistem filsafat spekulatifnya yang telah dibuat digantikan oleh teologisme yang kolot dan muncul Marxisme⁴.

Filsafat spekulatif salah satunya adalah membicarakan tentang hubungan antara hukum gerakan manusia dan kemerdekaan manusia, dimana dalam konteks ini manusia mulai berfikir kritis tentang proses pengambilan kebijakan umum oleh sistem kekuasaan negara. Filsafat spekulatif membicarakan tentang hakikat terdalam dari kenyataan dan batas-batas manusia didalam dunia fakta⁵.

Hakikat dari kenyataan memiliki keterkaitan dengan dialektika Hegel. Proses restorasi dan perkembangan kesadaran diri tiap manusia merupakan dialektika rasional menurut Hegel, tujuannya adalah mencapai kesatuan dan kebebasan diri yang berasal dari fakta dan pengetahuan manusia. Proses dialektika Hegel dirumuskan dalam tiga fase, yaitu fase pertama berupa "tesis", fase kedua berupa "antitesis", dan kemudian fase ketiga "sintesis". Penerapan ketiga fase tersebut dalam bermasyarakat dijelaskan kedalam munculnya pemikiran kanan, kiri, dan moderat⁶.

Pemikiran tentang suatu pandangan ekstrem ke kanan, maka pada saat yang bersamaan akan menimbulkan suatu reaksi ekstrem ke kiri, kemudian menghasilkan suatu pandangan baru berupa penyelarasan dari keduanya yang dimaknai dengan pandangan moderat. Bentuk tiga negara merupakan hasil pemikiran terakumulasi, sehingga memunculkan adanya bentuk negara diktatur dimana masyarakat mendapatkan jaminan hidup papan, pangan, dan sandang, akan tetapi warga negara tidak mempunyai kebebasan. Keadaan seperti ini menimbulkan adanya pemikiran anarki, yaitu pemikiran melawan terhadap sesuatu. Pemikiran anarki merupakan antitesis terhadap pemerintahan diktatur, dimana masyarakat mempunyai kebebasan, akan tetapi kebutuhan hidupnya tidak terjamin selayaknya pemerintahan diktatur. Pemikiran anarkis memicu adanya kemunculan sikap moderat dikalangan masyarakat akademisi dan sebagai bentuk pendewasaan pemikiran "tesis" dan "antitesis", sehingga menghasilkan produk berupa demokrasi⁷.

Tujuan filsafat spekulatif dapat dilihat dalam ringkasan Descartes dalam bukunya Perenungan Tentang Filsafat Pertama, dalam perenungan pertama dikemukakan bahwa alasan secara umum, dimana ini adalah pemikiran tesis, antitesis, dan sintesa, dapat mendasari keraguan kita akan sesuatu. Sikap ragu dalam sebuah pemikiran muncul akibat kurangnya pengetahuan yang dihimpun manusia, akan tetapi pemikiran harus tetap dijalankan dengan adanya keraguan tersebut, karena pada dasarnya sesuatu yang kita ketahui sekarang akan meragukan ketika kita mengetahui sesuatu yang lain⁸.

⁴ Louis Kattsoff and Soejono Soemargono, 'Pengantar Filsafat', *Tiara Wacana*, 1989.

⁵ Kattsoff and Soemargono.

⁶ Suyahmo, 'FILSAFAT DIALEKTIKA HEGEL: RELEVANSINYA DENGAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945', *Humaniora*, 2014 <<https://doi.org/10.22146/jh.v19i2.898>>

⁷ Suyahmo.

⁸ Descartes, Rene, 'Meditations on First Philosophy', in *Descartes: Selected Philosophical Writings*, 2013 <<https://doi.org/10.1017/cbo9780511805059.006>>

Keraguan meskipun tampak umum dan tidak tampak bahkan terkesan tidak mendasar, namun keraguan membebaskan kita dari prasangka, karena prasangka merupakan pemikiran tak berlogika yang muncul tanpa adanya pengetahuan. Pentingnya mengumpulkan informasi akan meminimalisir prasangka dan keraguan⁹. Politisasi agama adalah bentuk dari adanya ketidakpuasan suatu kelompok masyarakat tentang sistem politik dewasa ini. Penghimpunan suara oleh para politisi menggunakan uang adalah bentuk “antitesis” terhadap “tesis” yaitu sistem politik demokrasi yang sudah ada sebelumnya, sehingga kelompok yang belum mampu mengikuti trend money politic memilih menggunakan nilai holistik agama sebagai “tesis” baru. Agama menggunakan istilah dalam buku Agama Dan Politik Anti Kekerasan (1989) yang ditulis oleh Sudarmanto dimana dapat didefinisikan sebagai suatu realisasi sosio-individu yang hidup dalam ajaran, tingkah laku, ritus keagamaan dan berawal dari hubungan batiniyah yang melampaui kodrat manusia (konsep Tuhan) dan hambanya melalui tradisi masyarakat dan manusia¹⁰.

Realisasi sosio-individu ini menimbulkan nilai-nilai agama dipadukan dengan kepentingan politik, karena dinilai dapat membenarkan tatanan masyarakat dan tujuan politik suatu kelompok. Penggunaan nilai-nilai agama dalam politik dapat menimbulkan adanya pembentukan ideologi maupun pandangan baru dalam masyarakat yang akan mempengaruhi pilihan individu bahkan kelompok lain. Ideologi tersebut dapat efektif apabila dalam masyarakat terdapat ideologi dan hubungan kekuasaan yang menjamin seperti media massa, partai politik, atau organisasi masyarakat¹¹.

Ideologi merupakan sekumpulan gagasan yang melatarbelakangi pemikiran individu. Faktor munculnya ideologi dapat berasal dari nilai-nilai yang timbul di masyarakat, baik nilai-nilai kultural, nilai-nilai agama, nilai-nilai ajaran, bahkan nilai-nilai yang berasal dari penghayatan sekelompok masyarakat. Suatu ideologi akan mengakar kuat dalam individu masyarakat ketika individu disekelilingnya merasakan bahwa ideologi tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama. Bentuk lanjut dari adanya ideologi yang disepakati bersama oleh sekelompok individu menghasilkan gerakan kelompok yang mamiliki satu tujuan yang sama dan tersistematis guna mendapatkan legalitas atau pengakuan dari pihak lain. Ormas atau parpol adalah organisasi yang memiliki ideologi kelompok yang kuat, sehingga akan timbul beberapa gesekan antar kelompok akibat adanya pandangan gagasan yang berbeda yang bertujuan mempertahankan ideologi antar kelompok¹².

Pembicaraan mengenai politik Islam sangat menarik untuk dibahas karena pemahaman dikalangan umat Islam itu sendiri sangatlah beragam. Khususnya dalam ketatanegaraan Islam jika melihat secara empirik menurut¹³, yang mengelompokkan pemikiran tokoh-tokoh Islam menjadi tiga golongan, yang pertama menjelaskan bahwa Islam antara lain: Pertama, agama yang serba lengkap dimana terdapat ketentuan yang mengatur baik politik ataupun sistem kenegaraan. Karenanya menurut sekelompok golongan ini umat Islam harus menetapkan sistem kenegaraan Islam dalam bernegara yang mengacu pada keteladanan Nabi Muhammad serta khalifah sesudahnya dan tidak perlu

⁹ Kattsoff and Soemargono.

¹⁰ J. B. Sudarmanto, *Agama Dan Politik Kekerasan* (Yogyakarta: Kanisius, 1989).

¹¹ Sudarmanto.

¹² Peni Jati Setyowati, 'FUNGSI FILSAFAT, AGAMA, IDEOLOGI DAN HUKUM DALAM PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA', *Yuridika*, 2016 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1957>>.

¹³ Sirajudin, *Pemikiran Politik Ketatanegaraan Islam: Studi Pemikiran A. Hasjmy* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989).

meniru sistem kenegaraan Barat. Tokoh dari golongan ini adalah Hasan Al-Banna, Sayyid Qutbh, Abu Ala Al Mawdudi, dan Rasyid Ridha¹⁴.

Kedua, golongan dengan tokoh Husen Haikal, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, dan lainnya memiliki anggapan bahwa Islam memang mengatur soal kenegaraan, tetapi tidak menentukan secara lengkap dan tegas yang artinya tidak adanya sistem kenegaraan tetapi terdapat seperangkat etika dan tata nilai bagi kehidupan bernegara. Aliran ini menolak pendapat bahwa aturan kehidupan sudah disediakan lengkap dan sempurna oleh Islam. Al Quran hanyalah petunjuk bagi kehidupan bernegara¹⁵.

Ketiga, golongan yang menyatakan pendapatnya bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yakni aturan atau sistem kenegaraan dengan agama tidak ada kaitan sama sekali. Anggapan mereka Nabi Muhammad hanya ditugaskan berdakwah dan mewujudkan kebaikan antar sesama, tetapi tidak ditugaskan untuk membentuk sistem kenegaraan. Ali Abd Raziq, Thah Husen, dan Qamaruddin Khan adalah pemikir dalam golongan ini¹⁶.

Pandangan beberapa tokoh dapat disimpulkan bahwa Islam memandang hubungan antara agama dan negara menjadi tiga paradigma. Paradigma pertama atau disebut paradigma sekularistik mengatakan bahwa islam tidak memiliki hubungan dengan negara, karena dalam islam tidak mengatur kehidupan bernegara. Pendapat ini diperkuat oleh bukti historis bahwa wilayah Nabi Muhammad SAW (daerah yang telah menerima dakwah nabi) merupakan wilayah risalah tanpa adanya kepentingan politik maupun kekuasaan. Adanya paradigma ini menempatkan islam pada posisi agama sepenuhnya dan menyerahkan perkara politik kepada pemikiran sekuler¹⁷.

Paradigma kedua disebut sebagai paradigma formalistik, menganggap bahwa islam adalah agama yang mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan, bahkan termasuk masalah bernegara dan politik. Dasar penyelenggaraan politik dan negara didasarkan pada historis sistem pemerintahan pada masa hidup Nabi Muhammad SAW dan khalifah¹⁸.

Paradigma ketiga merupakan penengah terhadap kedua paradigma sebelumnya, dan berpendapat bahwa islam memiliki seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Islam pada paradigma ini secara normatif mendasari berpolitik, politik yang diterapkan adalah politik kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan atas nilai-nilai islam demi kesejahteraan masyarakat pada umumnya¹⁹.

Politik diartikan sebagai cara atau strategi kelompok masyarakat guna mengelola kebijakan masyarakat dalam rangka kekuasaan atau ketatanegaraan. Politik dalam pengertian Arab-Islam, politik diartikan sebagai assiyasah, dari kata sasa-yasus-siyasatan, yang berarti al -wilayah wa ar-ri'ayah (kekuasaan dan pemeliharaan) yaitu cara atau strategi kelompok yang bersifat menuntun, mengatur, mengurus, atau mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kebahagiaan atau kemaslahatan dunia dan akhirat, akan tetapi pada dasarnya cara atau strategi yang digunakan merupakan strategi politik. Pengertian

¹⁴ Rudiana, 'ISLAM SEBUAH SISTEM KEHIDUPAN NEGARA', *CosmoGov*, 2017 <<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11806>>.

¹⁵ Rudiana.

¹⁶ Rudiana.

¹⁷ Zaprul Khan Zaprul Khan, 'RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2014 <<https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.261>>.

¹⁸ Zaprul Khan.

¹⁹ Zaprul Khan.

politik seperti ini mengesankan suatu praktek sosial terkolektif yang tidak hanya berkaitan dengan kemaslahatan dunia, namun juga memiliki erat dengan keselamatan akhirat²⁰.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat ketika mengetahui adanya praktek politik seperti ini disambut dengan antusias karena masyarakat menilai politik yang dulunya sekuler menjadi bernilai religius. Islam diposisi sekarang sebagai religio-politic (ad-din wa as-siyasah), yaitu agama dan sistem politik sesuai paradigma formalistik. Religio politics dimata masyarakat memiliki nilai lebih berupa nilai holistik, sehingga memberikan kesan bahwa politik sekarang sudah mendekati konsep agama dan mendapat restu Tuhan²¹.

Peristiwa pergolakan politik islam “antitesis” terjadi pada masa khalifah Ali Bin Abi Thalib dengan munculnya peristiwa tahkim yaitu munculnya kelompok khawarij, terlepas dari pihak Muawiyah yang kemungkinan mempengaruhi kelompok tersebut agar menentang khalifah Ali karena ada awalnya mereka bersikeras melakukan langkah tahkim. Tahkim dinilai oleh kelompok tersebut tidak sesuai dengan harapan kemudian kelompok tersebut menolak hasilnya dan berpaling dari barisan Khalifah Ali. Kelompok tersebut berpendapat bahwa hal demikian tidak dapat diputuskan oleh arbitrase manusia akan tetapi menggunakan dalil al-Qur’an²².

Dalil al-Quran yang menjadi dasar mereka tidak menerima hasil tahkim adalah ayat 44 dari surat al-Maidah disebutkan di akhir ayat bahwa “barangsiapa tidak memutuskan (suatu permasalahan) menggunakan ayat hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir” kemudian muncul istilah la hukma illa Allah, kelompok tersebut menyuarakan bahwa putusan hanya datang dari Allah swt, dengan cara kembali kepada hukum yang ada dalam al-Quran. Kelompok tersebut kemudian menilai khalifah Ali berbuat salah dan dosa besar, kemudian keluar dari pihak khalifah Ali²³.

Khawarij pada awalnya muncul akibat pergolakan politik pada peristiwa tahkim, akan tetapi pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan khawarij memberikan sentuhan teologis dalam politik, bahkan sampai bersikap takfiri terhadap sesama umat muslim, doktrin seperti ini gencar terjadi terutama oleh kelompok Azariqah. Wacana politisasi agama sebenarnya sudah terlihat jelas pada kaum khawarij dimana menggunakan wacana agama dintrepetaskan kedalam kepentingan politik praktis²⁴.

Fenomena kaum khawarij yang menggunakan teks kitab suci sebagai dasar melakukan gerakan politik merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara pemikiran liberal dan tekstual. Pemikiran tekstual secara berlebihan tanpa memandang konteks menjadikan individu bahkan kelompok salah dalam menerapkan teks tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula pemikiran yang hanya berlandaskan konteks, sehingga dapat menimbulkan penggunaan teks kitab suci sesuai dengan kepentingan individu. Penyelesaian masalah dalam masyarakat, dalam konteks ini adalah politik, tidak dapat dikembalikan serta merta pada teks kitab suci, tetapi tidak juga dalam proses penyelesaian politik dalam masyarakat tanpa menggunakan landasan kitab suci. Kajian lebih lanjut mengenai teks dan konsep merupakan jalan keluar paling moderat dalam menyikapi fenomena politik praktis, sehingga akan terwujud kontestasi politik yang berlandaskan islam tanpa menyudutkan pihak lain²⁵.

²⁰ Fahmy Farid Purnama, ‘KHAWARIJISME: PERGULATAN POLITIK SEKTARIAN DALAM BINGKAI WACANA AGAMA’, *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2016 <<https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i2.156>>.

²¹ Purnama.

²² Purnama.

²³ Purnama.

²⁴ Purnama.

²⁵ Agus Zaenul Fitri, ‘PENDIDIKAN ISLAM WASATHIYAH: MELAWAN ARUS PEMIKIRAN TAKFIRI DI NUSANTARA’, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 2015.

Masuknya nilai-nilai agama dalam ruang politik jika ditinjau dengan konteks filsafat politik mengundang perdebatan panjang. Terjadinya arus timbal balik atau yang dapat juga disebut double movement antara arus Islamisasi dari jurusan lain dengan arus sekularisasi dari satu jurusan lain, hal tersebut menjadi latar belakang perdebatan panjang tersebut. Adanya pemikiran political liberalism atau filsafat politik liberal sebagai upaya doktrin komprehensif yang berupa pemanfaatan doktrin agama perlu dibendung guna menghindari konflik yang tak terselesaikan diantara masyarakat. Tetapi demikian, terdapat fakta historis dan sosiologis yang menunjukkan bahwa arus partisipasi doktrin agama tidak dapat dibendung di ruang publik meskipun arus sekularisasi terus berlangsung. Maka dari itu perkembangan politik kontemporer pada saat ini menurut Habermas sebagai fase post secularism atau pasca sekularisme yang mana tidak lagi entitas agama dianggap sebagai barang haram yang perlu dihindari. Kendati demikian terdapat persyaratan tertentu dengan adanya agama kembali ke ruang publik yaitu adanya kesepakatan atau penghargaan dari kedua belah pihak antara kaum sekuler dengan kaum agamis melalui dialog yang tulus²⁶.

Menyikapi adanya politisasi agama pada hari ini, masyarakat dibanjiri dengan banyaknya kabar politisasi agama, yaitu penggunaan istilah agama dikaitkan dengan politik, hingga muncul usulan bentuk pemerintahan baru berupa khilafah. Politisasi agama dapat diartikan sebagai gerakan neo-khawarij jika dinilai menentang kebijakan atau sistem pemerintahan yang telah diselenggarakan dan menyuarakan sikap takfiri atau menyerupainya²⁷. Takfiri dikhawatirkan jika dibiarkan berkembang, sebagaimana khawarij, dapat membuat gerakan yang mengancam keselamatan umum, seperti gerakan teroris sebagaimana yang terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan islam. Islam digunakan sebagai alasan suatu kelompok untuk melakukan gerakan pemberontakan terhadap kebijakan pemerintah ataupun kelompok lain yang tidak seideologi dengan mereka²⁸.

Fenomena seperti ini disebut juga dengan sikap etnosentris yang muncul pada golongan garis keras. Mereka memandang bahwa agama yang dianutnyalah yang benar dan agama yang lain salah. Dalam konteks kepentingan politik mereka memupuk sikap tersebut dalam memobilisasi sejumlah massa dan menggunakan nilai holistik agama untuk kepentingan politik praktis, bahkan tidak segan juga untuk menjatuhkan lawan politiknya hingga mengerahkan segala cara demi memenangkan kontestasi politik. contoh kecil dalam politisasi agama adalah menggunakan istilah yang memiliki nilai agama untuk memperkuat identitas demi memperoleh suara mayoritas, baik dalam bentuk tulisan, pidato, bahkan tokoh agama dijadikan pasangan calon guna mendapatkan simpatisan dan suara.²⁹

Khilafah menurut Ali Abd al-Raziq bahwa tidak ada istilah sistem khilafah dalam al-Quran maupun Sunnah. Menurut Raziq, khilafah adalah intrepertasi sikap kepemimpinan secara umum, baik dalam beragama dan dunia (ketatanegaraan) selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah ibn khaldun menguraikan Khilafah secara komprehensif sebagai berikut “Khilafah adalah memerintah rakyat sesuai dengan aturan shara’, demi kebaikan akhirat

²⁶ Irfan Noor, ‘ISLAM TRANSNASIONAL DAN MASA DEPAN NKRI: Suatu Perspektif Filsafat Politik’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 2016 <<https://doi.org/10.18592/jiu.v10i1.742>>.

²⁷ Zaprul Khan.

²⁸ Basia Spalek, ‘Community Engagement for Counterterrorism in Britain: An Exploration of the Role of “Connectors” in Countering Takfiri Jihadist Terrorism’, *Studies in Conflict and Terrorism*, 2014 <<https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.941436>>.

²⁹ Siti Faridah and Jerico Mathias, ‘Polarisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu’, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2018.

mereka dan juga kebaikan dunia yang kembali pada kepentingan akhirat dan kesejahteraan rakyat. Sebab menurut shara' persoalan-persoalan dunia semuanya kembali kepada kepentingan akhirat. Khilafah dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan pembuat shara' (sāhib al-shara') dalam menjaga eksistensi agama dan sistem politik dunia." Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan sebagai khalifah berada pada posisi Nabi Muhammad SAW, karena beliau bukan hanya mengurus persoalan agama juga mengurus persoalan dunia. Sistem kekuasaan khilafah adalah sebuah tanggungjawab untuk menjalankan nilai-nilai agama dalam lingkup pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat³⁰.

Menurut Ibnu Taimiyah, kepemimpinan merupakan bagian dari menunaikan amanat. Dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dalam kitab ke 49 Kitab Memerdekakan Hamba Sahaya dan bab ke 17 Bab Dibencinya Berindak Melampaui Batas Kepada Hamba Sahaya, kemudian dijelaskan oleh Baqi bahwa setiap kalian (manusia) adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu (amanah), setiap orang yang memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu dituntut untuk menjalankannya dengan adil dan menjaga kemaslahatan agamanya. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, maka jika setiap amanah dijalankan sebagaimana mestinya akan mendapatkan pahala yang sempurna dan kebaikan yang besar, akan tetapi jika tidak dijalankan dengan baik maka setiap orang yang menjadi tanggung jawabnya akan menuntut haknya³¹.

Hadits Rasulullah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ke 83 Kitab Sumpah dan Nadzar, Bab ke 1 menerangkan tentang firman Allah Surat al-Baqarah ayat 225, bahwa kekuasaan atau jabatan adalah perkara yang berat, sehingga hanya oleh orang-orang tertentu saja yang dapat memikul amanat dari masyarakat, oleh karena itu janganlah engkau meminta kekuasaan hanya untuk dipandang orang saja, karena jika engkau memintanya maka allah tidak akan menolong dan dibiarkan menjalankannya³².

Politik Islam didefinisikan oleh Eickelman dan Piscatori sebagai kompetensi persaingan yang melibatkan penafsiran simbol dan kontrol atas lembaga formal ataupun nonformal yang mempertahankan dan memproduksi simbol tersebut. Eickelman dan Piscatori berpendapat bahwa Islam menjadi bahan bahasan utama politik, keduanya menekankan konteks pergeseran dan perkembangan makna, serta penggunaan simbol, nilai, dan tradisi, dan menekankan multiplisitas interpretasi. Hal tersebut dikarenakan baik oleh diversitas dari ulama tradisionalis dan kaum intelek modernis dan beragam konteks budaya dan politik. Sifat, agenda tertentu, taktik, dan tujuan kelompok Islamis yang beragam ditunjukkan oleh aktor berakar dalam konteks seperti akar sosio historis dan sebab akibatnya. Perdebatan politik yang memanfaatkan isu Islam juga dijelaskan melalui pendekatan contentious politics atau perseteruan politik. Perseteruan politik muncul disaat terjadi perubahan dalam kesempatan politik dan tantangan yang menyediakan insetif baru³³.

Adanya pendekatan politisasi Islam dijadikan ajang pertarungan sejumlah kelompok sosial politik seperti ormas, negara, partai, dan lain sebagainya dengan mencapai tujuan tertentu. Cara yang dilakukan oleh kekuatan dominan untuk mempertahankan dan membentuk hegemoni. Bagi kekuatan aktor sosial lebih marginal dan cenderung untuk

³⁰ Zaprul Khan.

³¹ Fuad Abdul Baqi M, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2010).

³² Baqi M.

³³ M. Zaki Mubarak and Mohamad Zaini Abu Bakar, 'POLITIK ISLAM MAHATHIR MOHAMMAD DI MALAYSIA DAN SOEHARTO DI INDONESIA', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2018 <<https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1292>>.

mendapatkan sejumlah keuntungan contohnya mendapat posisi yang lebih baik hingga merebut kekuasaan. Terdapat faktor penting yang memengaruhi bagi sukses atau tidaknya tindakan, antara lain jumlah besarnya sumber daya yang dimiliki, adanya keterampilan untuk membangun framing, serta struktur kesempatan politik yang tersedia³⁴.

Adanya politisasi agama yang disinggung dalam jurnal ini setidaknya ada dua langkah yang dikembangkan untuk mengantisipasi ideologi transnasional dan radikal dari gerakan Islam sejak setelah Orde Baru yaitu antara lain: pertama, penegakan hukum yang adil jika ada tindakan kekerasan atas nama agama. Jika adanya kesungguhan penegakan hukum terhadap pelaku, maka masyarakat akan berangsur-angsur percaya kepada aparat penegak hukum dan memunculkan pandangan positif bahwa kekerasan yang dilakukan atas nama agama adalah termasuk pelanggaran hukum yang tidak sesuai aturan dalam kehidupan bermasyarakat³⁵.

Keberadaan organisasi Islam tetap dibenarkan selama tidak mengekspresikan sikap tidak toleran dan menimbulkan kekacauan yang merupakan sebagian hak untuk bebas berekspresi dan berorganisasi. Jika kekerasan menjadi salah satu dari aksinya, maka harus segera ditindak dan diproses secara hukum oleh negara. Kedua membentuk kanal politik bagi kaum elit dan kanal ekonomi dari anggota yang merupakan strategi komprehensif deradikalisasi. Langkah-langkah untuk menjalankan strategi deradikalisasi yaitu dengan memoderasi pandangan kegamaan dan transformasi anggota agar menjadi lebih moderat³⁶.

Moderasi dapat dilakukan bagi elit organisasi Islam radikal dengan membentuk kanal politik baru untuk menemukan titik temu pandangan yang lebih kompromistis yang terdapat dalam kerangka demokrasi. Sedangkan kanal ekonomi yang dilakukan oleh para anggota organisasi radikal adalah masyarakat akar rumput yang umumnya tingkat kesejahteraannya rendah. Adanya kanal ekonomi dapat menjawab kegelisahan masyarakat kalangan bawah yang mengalami keterbelakangan ekonomi³⁷.

Politisasi agama dikhawatirkan merupakan manipulasi opini masyarakat melalui media masa guna menutupi adanya pemikiran kapitalis atau pengambilan keuntungan dari jabatan. Politik dewasa ini menunjukkan adanya pengambilan keuntungan dari jabatan individu atau kelompok agar dapat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. kapitalis adalah sebuah pola pikir individu tentang bagaimana mengambil keuntungan dari apa yang akan dijual (dalam konteks politik). Money politic menimbulkan kebutuhan dana dalam memperoleh massa dan suara dalam jumlah besar. Dana politik (partai) berasal dari pemodal partai yang statusnya pengusaha swasta, maka dari itu demi melancarkan usahanya banyak pengusaha atau perusahaan mendekati partai untuk mendanai terpilihnya wakil partai. Sebagai timbal balik dari partai ketika sudah mendominasi kekuasaan daerah atau negara, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dapat dipermudah³⁸.

Perhelatan politik dimana seperti pemilu serentak yang diadakan pada tanggal 17 April 2019 memiliki efek yang cukup besar terhadap iklim ekonomi internasional maupun nasional misalnya mampu memengaruhi Trading Volume Activity (TVA) dan abnormal return saham. Dua puluh hari setelah pemilu berlangsung, aliran uang dalam negeri terjadi pergerakan investor. Pergerakan investor tersebut berdampak pada proses pembangunan yang sedang berjalan, selama, dan setelah dari diadakannya pemilu tersebut karena proses

³⁴ Mubarak and Abu Bakar.

³⁵ Noor.

³⁶ Noor.

³⁷ Noor.

³⁸ D Gerard, D. & Foley, *Analisa Marx Atas Produksi Kapitalis* (Jakarta: Indo Progress, 2015).

pembangunan tersebut sangat bergantung dari para investor yang kebanyakan adalah investor asing. Investor yang telah mengetahui hasil pemilu melalui quick count tersebut akan mengambil tindakan di pasar modal, karena partai pemenang dalam pilihan suara tersebut memiliki kebijakan tersendiri dalam pasar modal kedepannya³⁹.

Politik yakni sebagai jalan untuk menentukan pemimpin serta dewan perwakilan rakyat bagi masyarakat memiliki andil yang besar dalam mengelola segala bentuk sumber daya yang dimiliki oleh negara salah satunya adalah sumber daya alam, yang mana salah satu fungsi dari sumber daya alam sendiri adalah dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sumber daya alam ini merupakan komoditas yang sangat menggiurkan bagi kaum kapitalis dimana mereka menggali dan mengambil keuntungan yang besar dari hasil penjualan komoditas dari sumber daya alam ini. Sumber daya alam sebenarnya hanya dapat dikelola oleh perusahaan tertentu yang mendapat izin dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah⁴⁰.

Eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan swasta dipersulit seiring dengan banyaknya ketentuan hukum yang melindungi pengelolaan sumber daya alam. Menjadi donatur bagi calon yang maju dalam pemilu merupakan salah satu strategi dari perusahaan swasta agar dapat mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam. Sebagai gantinya, perusahaan swasta meminta proses eksploitasi sumber daya alam dipermudah. Hukum mengenai pengelolaan lingkungan dan sumber daya alamnya sebagai bukti dihasilkannya produk hukum dari pemerintah serta ketidaktegasan para penegak hukum dalam mengatasi perusakan lingkungan⁴¹.

Pergolakan politik yang berorientasi kekuasaan demi kemashlahatan masyarakat mulai bergeser ke politik sebagai komoditas, dimana jabatan memiliki nilai jual tersendiri. Jabatan dibawah pemegang kekuasaan dijual kepada mereka yang mengharapkan jabatan dibawah pemegang kekuasaan. Jabatan yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai penentu kebijakan daerah, orientasi keuntungan dapat diperoleh ketika adanya program pembangunan melalui dana yang dianggarkan misalnya. Menurut analisis Karl Marx mengenai kapitalis, bahwa selalu ada perspektif politik jika membicarakan penyelidikan masalah ekonomi, pemanfaatan jabatan sebagai pengatur kebijakan produksi feodal adalah suatu cara untuk mendapatkan surplus yang dikerjakan oleh para budak. Kekuasaan politik dan agama adalah cara bagi para bangsawan untuk mendominasi ekonomi rakyat dalam bentuk pajak maupun tanah. Adanya eksploitasi sumber daya alam menjadi satu dari sekian banyak komoditi bagi pengusaha⁴².

Kesimpulan

Politisasi agama adalah penggunaan istilah dalam politik, penggunaan istilah agama sebenarnya adalah suatu bentuk antitesis terhadap sistem politik yang sudah ada, dimana sistem politik ini dianggap sebagai tesis dalam dialektika Hegel. Penggunaan istilah agama dalam politik secara historis pernah dilakukan oleh kaum khawarij pada konflik khalifah Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa tahkim, dimana beberapa pengikut khalifah Ali mengambil suatu keputusan dan dinilai tidak sesuai dengan pendapat beberapa

³⁹ Harris Manurung, 'PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP RETURN SAHAM DI INDONESIA (Studi Kasus Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia)', *Journal for Business and Entrepreneur*, 2019.

⁴⁰ Sutrisno, 'POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2011 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art8>>.

⁴¹ Sutrisno.

⁴² Gerard, D. & Foley.

kelompok khawarij, mereka menyuarakan la hukma illa allah, dengan dasar dalil surat al-Maidah ayat 44, yang menjelaskan bahwa “barangsiapa tidak memutuskan (suatu permasalahan) menggunakan ayat hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir”, akan tetapi khawarij secara tekstual saja dalam mengartikan kalam Allah, sehingga khalifah Ali mengatakan bahwa kalimat itu benar, tapi tidak baik. Gerakan neo-khawarij muncul dikala ada gerakan konfrontatif dan menggunakan dalil kitab suci untuk mengkafirkan seama umat islam, karena khawarij selepas tahkim mulai berkembang menjadi kelompok teologis yang kolot dan terkesan takfiri jika ada yang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Penggunaan istilah agama dengan tujuan politik seharusnya benar-benar didasari oleh ideologi agama dan visi yang sesuai dengan ideologi, bukan menjadi batu loncatan agar mendapatkan banyak suara dari rakyat.

Ideologi yang harus dibawa diharapkan dapat memberikan bukan hanya visi dan janji politik, tapi direalisasikan dalam bentuk program kesejahteraan masyarakat umum. Selain itu dikhawatirkan dengan adanya isu politisasi agama dalam pemilu yaitu memanipulasi opini masyarakat melalui media massa adanya guna menutupi pemikiran kaum kapitalis yang ingin meraih keuntungan sebanyak-banyaknya yang mana diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar. Sesuai dengan analisis dari Karl Marx dimana kekuasaan politik dan agama adalah cara bagi para petinggi negara mendominasi seluruh ekonomi rakyat berupa pajak atau tanah.

Daftar Pustaka

- Baqi M, Fuad Abdul, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2010)
- Descartes, Rene, and Rene Descartes, ‘Meditations on First Philosophy’, in *Descartes: Selected Philosophical Writings*, 2013
<<https://doi.org/10.1017/cbo9780511805059.006>>
- Faridah, Siti, and Jerico Mathias, ‘Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu’, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2018
- ‘FILSAFAT DIALEKTIKA HEGEL: RELEVANSINYA DENGAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945’, *Humaniora*, 2014
<<https://doi.org/10.22146/jh.v19i2.898>>
- Fitri, Agus Zaenul, ‘PENDIDIKAN ISLAM WASATHIYAH: MELAWAN ARUS PEMIKIRAN TAKFIRI DI NUSANTARA’, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 2015
- Gerard, D. & Foley, D, *Analisa Marx Atas Produksi Kapitalis* (Jakarta: Indo Progress, 2015)
- Kattsoff, Louis, and Soejono Soemargono, ‘Pengantar Filsafat’, *Tiara Wacana*, 1989
- Kriyantono, Rachmat, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat Dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam* (Prenada Media, 2019)
- Madjid, Nurcholish, *Islam: Doktrin & Peradaban* (Gramedia pustaka utama, 2019)
- Manurung, Harris, ‘PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP RETURN

- SAHAM DI INDONESIA (Studi Kasus Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia)', *Journal for Business and Entrepreneur*, 2019
- Mubarak, M. Zaki, and Mohamad Zaini Abu Bakar, 'POLITIK ISLAM MAHATHIR MOHAMMAD DI MALAYSIA DAN SOEHARTO DI INDONESIA', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2018 <<https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1292>>
- Noor, Irfan, 'ISLAM TRANSNASIONAL DAN MASA DEPAN NKRI: Suatu Perspektif Filsafat Politik', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 2016 <<https://doi.org/10.18592/jiu.v10i1.742>>
- Purnama, Fahmy Farid, 'KHAWARIJISME: PERGULATAN POLITIK SEKTARIAN DALAM BINGKAI WACANA AGAMA', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2016 <<https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i2.156>>
- Ramadhan, Muhammad, 'Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa' (Nasya Expanding Management, 2019)
- Rudiana, Rudiana, 'ISLAM SEBUAH SISTEM KEHIDUPAN NEGARA', *CosmoGov*, 2017 <<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11806>>
- Setyowati, Peni Jati, 'FUNGSI FILSAFAT, AGAMA, IDEOLOGI DAN HUKUM DALAM PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA', *Yuridika*, 2016 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1957>>
- Sirajudin, *Pemikiran Politik Ketatanegaraan Islam: Studi Pemikiran A. Hasjmy* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989)
- Spalek, Basia, 'Community Engagement for Counterterrorism in Britain: An Exploration of the Role of "Connectors" in Countering Takfiri Jihadist Terrorism', *Studies in Conflict and Terrorism*, 2014 <<https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.941436>>
- Sudarmanto, J. B., *Agama Dan Politik Kekerasan* (Yogyakarta: Kanisius, 1989)
- Sutrisno, Sutrisno, 'POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2011 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art8>>
- Zaprulkhan, Zaprulkhan, 'RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2014 <<https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.261>>